

**TRANSPARANSI PELAYANAN DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Andalas***

OLEH:

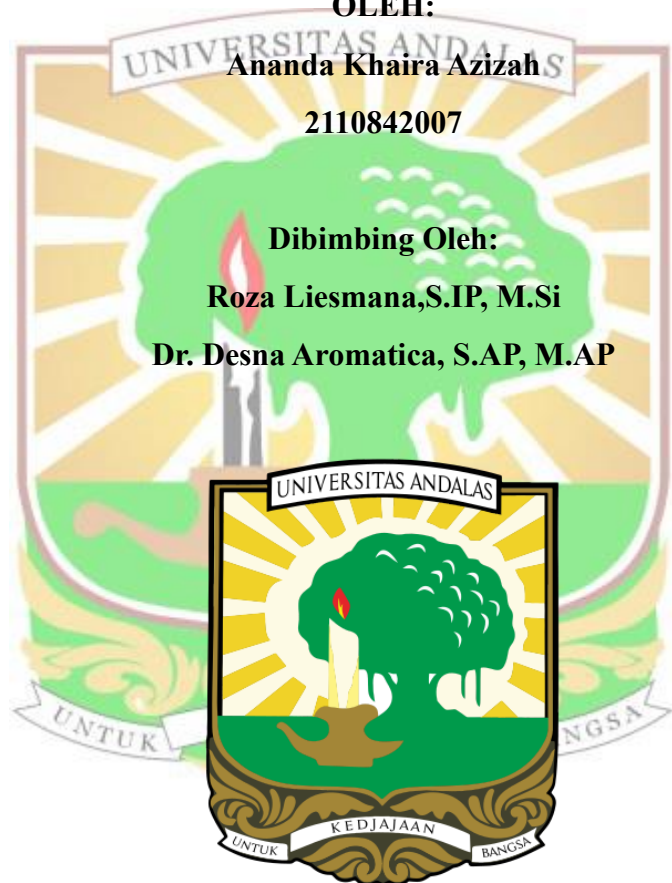
Ananda Khaira Azizah

2110842007

Dibimbing Oleh:

Roza Liesmana, S.IP, M.Si

Dr. Desna Aromatica, S.AP, M.AP



**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2026

ABSTRAK

Ananda Khaira Azizah, NIM 2110842007, Transparansi Pelayanan DTKS Oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Dibimbing Oleh: Roza Liemana, SIP, M.Si dan Dr. Desna Aromatica, S.AP, M.AP. Skripsi ini terdiri dari 97 halaman dengan referensi 8 buku teori, 5 skripsi, 10 jurnal, 6 dokumen.

Latar belakang penelitian ini adalah masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada pelayanan publik, seperti keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelayanan DTKS, serta adanya ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya analisis transparansi pelayanan DTKS. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis transparansi pelayanan DTKS oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori transparansi pelayanan publik menurut Agus Dwiyanto. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman dengan pengujian keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pelayanan DTKS di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada tingkat yang rendah. Keterbukaan informasi pada tahap pengusulan, verifikasi dan validasi, serta penetapan dan pemutakhiran data masih bersifat administratif dan belum menjamin kemudahan akses, pemahaman masyarakat, serta kemampuan publik untuk mengawasi proses pelayanan DTKS. Minimnya sarana penyampaian informasi, lemahnya sosialisasi peraturan dan prosedur, serta rendahnya responsivitas aparatur nagari terhadap permintaan informasi masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut. Akibatnya, masyarakat belum memperoleh kepastian informasi dan masih berada pada posisi pasif dalam proses pelayanan DTKS. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan keterbukaan informasi, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan DTKS dapat dilaksanakan secara transparan dan berkeadilan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kata kunci: Transparansi, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Publik.

ABSTRACT

Ananda Khaira Azizah, NIM 2110842007, *Transparency of Integrated Social Welfare Data (DTKS) Services by the Pesisir Selatan Regency Government, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Andalas. Supervised by Roza Liemana, S.IP., M.Si. and Dr. Desna Aromatica, S.AP., M.AP. This thesis consists of 97 pages and is supported by 8 theoretical books, 5 theses, 10 journal articles, and 6 official documents.*

The background of this study is the persistence of various problems in the management of the Integrated Social Welfare Data (DTKS) in public services, such as limited public access to information, a lack of community understanding of DTKS management mechanisms, and discrepancies between recorded data and actual socio-economic conditions in the field. These conditions indicate the need for an analysis of transparency in DTKS management. This study aims to analyze the transparency of DTKS management in public services conducted by the Government of Pesisir Selatan Regency.

This study employs the public service transparency theory proposed by Agus Dwiyanto. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Informants were selected using purposive sampling. Data analysis was conducted based on the Miles and Huberman model, with data validity tested through source triangulation.

The results indicate that transparency in DTKS management in Pesisir Selatan Regency has not yet been optimal. This is reflected in limited information disclosure, service procedures that are not fully understood by the public, and service access that still encounters various obstacles. In addition, data inaccuracies were found, leading to public complaints regarding the determination of social assistance beneficiaries. These constraints are influenced by limitations in service-supporting facilities and the low intensity of socialization to the community. Suboptimal transparency has implications for low public trust in DTKS management. Therefore, efforts are needed to improve information disclosure, strengthen coordination among stakeholders, and optimize the use of information technology so that DTKS management can be carried out transparently and equitably in public services in Pesisir Selatan Regency.

Keywords: Transparency, Integrated Social Welfare Data, Public Services.